



P U T U S A N

NOMOR: 38 / G / 2010 / PTUN. Smg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut, dalam perkara antara:- -----

N a m a : KOEN ENDRO

NOERTJAHJO,S.Sos;- -----

Kewarganegaraan : Indonesia

(Jawa);- -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri

Sipil;- -----

Pangkat : Penata Muda Tingkat

I (III/b);- -----

Unit Organisasi : Sekretaris Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Demak;- -----

Alamat : Jl. Cempaka III No. 42, Perum

Wijaya Kusuma II, Kelurahan

Katonsari,

Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;- -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2010

memberikan kuasa kepada :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasar kan??..?.

1. SUHARNO,SH.-----

-----

2. MUSTA'IN,S.Ag,SH.-----

-----

Kewarganegaraan : Indonesia (Jawa), Pekerjaan : Advokat /  
Pengacara yang berkantor di Lembaga Konsultasi Dan Bantuan  
Hukum (LKBH) "DEMAK BERAMAL" beralamat Jl. Raya Semarang-  
Purwodadi Km 17, Dusun Kuripan- Karangawen- Demak. Dalam hal  
ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan dari  
Penggugat;- -----

Selanjutnya disebut sebagai

**PENGGUGAT**-----

**M E L A W A N**

Nama Jabatan : **BUPATI**

**DEMAK**;- -----

-----

Berkedudukan : Jl. Kyai Singkil No. 7 Bintoro-

Demak;- -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/1207/2010

tanggal 22 September 2010, memberikan kuasa dan Hak

Substitusi

kepada :- -----

1. N a m a : **WINDU**

**SUNARDI,SH.MH**;- -----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten

Demak;- -----

2. N a m a : **AGUS** **JOKO**

**IRIANTO,SH.MM**;- -----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bagian Hukum Setda

Kabupaten

Demak;-----

---

3. Nama : AFIFUR

RAHMAN,SH;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten

Demak;-----

Kesemuanya beralamat di Jl. Kyai Singkil Nomor 7 Demak dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/1208/2010 tertanggal 23 September 2010 memberikan kuasa dengan hak substitusi

kepada :------

-----

1. Nama : MUHARSUKO

WIRONO,SH.MH;-----

Pekerjaan : Advokat /

Pengacara;-----

-----

2. Nama : AHMAD RUDI

FIRDAUS,SH;-----

Pekerjaan : Advokat /

Pengacara;-----

-----

3. Nama : ARUN

PRATAMA,SH;-----

-

Pekerjaan : Advokat /

Pengacara;-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. N a m a : Tel ah??..?. AHMAD

MUTHOHAR,SH;- .....

Pekerjaan : Advokat /

Pengacara;- .....

----

Kesemuanya adalah ADVOKAT/Pengacara pada Kantor Advokat

Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum MKGR Jawa Tengah

beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 23

Semarang;- .....

-----

Selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT**- .....

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Semarang Nomor : 38/PEN.MH/2010/PTUN.SMG tanggal 31

Agustus 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim pemeriksa

perkara

tersebut ;- .....

-----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor :

38/PEN.PP/ 2010/PTUN.SMG tanggal 3 September 2010 tentang

Pemeriksaan Persiapan yaitu pada hari Kamis tanggal 16

September

2010 ;- .....

-----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor :

38/Pen.HS/2010/ PTUN.SMG tanggal 14 Oktober 2010 tentang

Hari Persidangan Pertamanya yaitu pada hari Kamis tanggal

21

Oktober



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 ; - - - - -  
- - - - -

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 38/PEN.MH/2010/PTUN.SMG tanggal 29 Oktober 2010 tentang Pergantian Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut; - - - - -

Telah mendengar kedua belah pihak;

Telah membaca berkas- berkas perkara;

Telah membaca dan memeriksa bukti- bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi dimuka persidangan ;

- - - - - **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** - - - - -

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertulisnya tertanggal 26 Agustus 2010, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 27 Agustus 2010 dan telah diperbaiki pada tanggal 14 Oktober 2010 dibawah register perkara Nomor : 38/G/2010/PTUN.SMG, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Adapun Gugatan yang kami ajukan ini didasarkan pada kronologi dan kejadian sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ??..?.

1. Bahwa Peggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak, NIP. 500105855 Penata Muda Tingkat I (III/b), Jabatan : Staf, Unit Organisasi : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak; -

2. Bahwa Peggugat menjabat sebagai YMT Kepala Sub Bagian Keuangan merangkap Pemegang Kas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;-

3. Bahwa Peggugat pada tanggal 29 September 2005 sampai dengan tanggal 25 Desember 2005 tidak masuk kerja, kemudian Peggugat masuk kerja lagi pada tanggal 26 Desember 2005 dan pada saat itu juga dilakukan pemeriksaan terhadap Peggugat oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten Demak di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Demak;-

4. Bahwa kemudian Sekretaris DPRD Kabupaten Demak menerbitkan Surat Nomor : 862/866 tanggal 23 Nopember 2005 Perihal Laporan Disiplin PNS;-

5. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Desember 2005 Sekretaris DPRD Kabupaten Demak dengan Surat Nomor : 800/947 telah mengusulkan penghentian gaji Peggugat mulai bulan Januari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006;- -----  
-----

6. Bahwa sebenarnya Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki kinerja dan berusaha masuk kantor pada tanggal 26 Desember 2005, namun Sekretaris DPRD Kabupaten Demak tetap mengusulkan penghentian gaji Penggugat dan pada bulan Januari 2006 Penggugat sudah tidak menerima gaji lagi;- -----

7. Bahwa karena pada bulan Januari 2006 telah diumumkan dalam apel pagi bahwa Penggugat sudah tidak menerima gaji, sehingga Penggugat merasa malu maka kemudian Penggugat tidak masuk kerja lagi;- -----

8. Bahwa kemudian Badan Pengawas Daerah Kabupaten Demak pada tanggal 6 Maret 2006 telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Penggugat dengan Surat Nomor : 356/06/K/2006/RHS, tentang kasus penyelewengan oleh sdr. Koen Endro Noertjahjo, S.Sos. Nip. 500105855 Penata Muda Tingkat I (III/b) Yang Menjalankan Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan merangkap Pemegang Kas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Bupati Demak Nomor : 888/305/2009;- -----

9. Bahwa Kemudian Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Demak pada tanggal 15 Mei 2006 telah menerbitkan Surat Nomor : 356/55/Rhs tentang Rekomendasi Pengenaan Hukuman Disiplin;- -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 
10. Bahwa dalam SK. Bupati Demak Nomor : 888/305/2009  
hor nat ??..?.  
Tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL A/n. Sdr. KOEN ENDRO  
NOERTJAHJO,S.Sos. NIP. 500105855 tertanggal 05 Maret  
2009, Penggugat dinyatakan telah diberhentikan tidak  
dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh tergugat  
karena dianggap telah melanggar Pasal 12 ayat 93)  
Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979;-----
11. Bahwa berdasarkan SK. Bupati Demak Nomor : 888/305/2009  
tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL A/n. Sdr. KOEN ENDRO  
NOERTJAHJO,S.Sos. NIP. 500105855 tertanggal 05 Maret  
2009, dinyatakan bahwa : Membaca pada poin b. Surat  
Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Demak Nomor :  
356/55/Rhs. Tanggal 15 Mei 2006 Tentang Rekomendasi  
Penaan Hukuman Disiplin;-----
12. Bahwa Surat Rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas  
Daerah Kabupaten Demak Nomor : 356/55/Rhs. Tertanggal 15  
Mei 2006 Tentang Rekomendasi Penaan Hukuman Disiplin,  
akan tetapi Bupati Demak mengeluarkan SK. Nomor :  
888/305/2009 tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT  
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL A/n. Sdr. KOEN ENDRO  
NOERTJAHJO,S.Sos. NIP. 500105855 tertanggal 05 Maret  
2009, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2006. Maka  
dengan demikian SK. Bupati Demak Nomor : 888/305/2009  
Tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGGA HORMAT SEBAGAI PEGAWAI  
NEGERI SIPIL A/n. Sdr. KOEN ENDRO NOERTJAHJO,S.Sos. NIP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500105855 tertanggal 05 Maret 2009 adalah kabur;- ----

13. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang dalam waktu 6 (enam) bulan terus-menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;- -----

14. Bahwa SK. Bupati Demak Nomor : 888/305/2009 Tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL A/n Sdr. KOEN ENDRO NOERTJAHJO,S.Sos. NIP. 500105855 yang menyatakan, Menetapkan : Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006;- -----

15. Bahwa karena Penggugat tidak masuk kerja pada tanggal 29 September 2005 sampai dengan tanggal 25 Desember 2005, kemudian Penggugat pada tanggal 26 Desember 2005 telah masuk kerja kembali, maka SK. Bupati Demak Nomor : 888/305/2009 Tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL A/n Sdr. KOEN ENDRO NOERTJAHJO,Ssos. NIP. 500105855 yang menyatakan Menetapkan : Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006, maka SK. Bupati Demak Nomor : 888/305/2009 tertanggal 05 Maret 2009, adalah tidak sah/cacat hukum karena bertentangan dengan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979;- -----

16. Surat Keputusan Bupati Demak berdasarkan Pasal 12 ayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang dalam waktu 6(enam) terus-menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak terpenuhi sebab pada tanggal 26 Desember 2005 Penggugat telah masuk kerja kembali ( tidak masuk kerja kurang dari 3 bulan );- ----

17. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2010 istri Penggugat menerima SK. Bupati Demak Nomor : 888/305/2009 Tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL A/n. Sdr. KOEN ENDRO NOERTJAHJO,S/Sos. NIP. 500105855 tertanggal 05 Maret 2009 sehingga masih tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;- -----

18. Bahwa karena SK. Bupati Demak 888/305/2009 tertanggal 05 Maret 2009 berlaku mulai tanggal 1 Januari 2006 adalah bertentangan dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979, Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;- -----

19. Bahwa apa yang telah dituduhkan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Demak dan Badan Pengawas Daerah Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demak tentang tindak pidana korupsi sampai saat ini belum terbukti karena perkara tersebut masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Demak;- -----

20. Bahwa karena SK. Bupati Demak Nomor : 888/305/2009 Tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL A/n. Sdr. KOEN ENDRO NOERTJAHJO,S.Sos. NIP. 500105855 tertanggal 05 Maret 2009 yang dinyatakan berlaku sejak 01 Januari 2006 ( berlaku surut ) tersebut cacat hukum maka SK. Bupati Demak Nomor : 888/305/2009 Tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL A/n. Sdr. KOEN ENDRO NOERTJAHJO,S.Sos. NIP. 500105855 tertanggal 05 Maret 2009 tersebut harus dibatalkan;- -----

21. Bahwa karena SK. Bupati Demak Nomor : 888/305/2009 Tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL A/n. Sdr. KOEN ENDRO NOERTJAHJO,S.Sos. NIP. 500105855 tertanggal 05 Maret 2009 tersebut tidak sah, maka Tergugat harus mencabut kembali SK. Bupati Demak Nomor : 888/305/2009 Tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL A/n. Sdr. KOEN ENDRO NOERTJAHJO,S.Sos. NIP. 500105855 tertanggal 05 Maret 2009 tersebut serta Tergugat harus memulihkan kembali hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak;- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa gaji terakhir Penggugat setiap bulan adalah sebesar Rp. 1.129.856- (satu juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus . . ? . lima puluh enam rupiah);- -----

23. Bahwa Tergugat harus dan wajib membayar ganti rugi berupa gaji dan tunjangan- tunjangan yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Demak terhitung sejak 01 januari 2006 sampai dengan perkara ini diputuskan oleh Pengadilan;- -----

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan memutuskan:- -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;- -----

2. Menyatakan batal atau tidak sah SK. Bupati Demak Nomor : 888/305/2009 Tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL A/n. Sdr. KOEN ENDRO NOERTJAHJO,S.Sos. NIP. 500105855 tertanggal 05 Maret 2009;- -----

3. Memerintahkan agar Tergugat mencabut kembali SK. Bupati Demak Nomor : 888/305/2009 Tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL A/n. Sdr. KOEN ENDRO NOERTJAHJO,S.Sos.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, ??..?.

NIP. 500105855 tertanggal 05 Maret 2009;- -----

4. Memerintahkan agar Tergugat memulihkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak;- -----

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tentang SK. Pengangkatan kembali saudara Koen Endro Noertjahjo, S.Sos sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kabupaten Demak;- -----

6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa gaji dan tunjangan yang menjadi hak Penggugat terhitung sejak bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Oktober 2010 = sebesar Rp. 1.129.856,- x 58 bulan = Rp. 65.531.648,- (enam puluh lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah);- -----

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.- ---

Atau :

Mohon putusan yang seadil- adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat juga telah mengajukan eksepsi dan jawabannya pada persidangan tanggal 28 Oktober 2010 yang pada pokoknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan TERGUGAT Nomor : 888/305/2009, tertanggal 5 Maret 2009 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Sdr. Koen Endro Noertjahjo, S.Sos, NIP. 500105855;-

2. Bahwa pada prinsipnya, yang menjadi pokok persoalan dalam perkara a quo adalah Sengketa Kepegawaian;-

3. Bahwa karena yang menjadi pokok persoalan adalah Sengketa Kepegawaian, maka seharusnya terlebih dahulu ditempuh dengan upaya administrasi. Apabila upaya administrasi telah ditempuh dan yang bersangkutan (PENGGUGAT) masih belum puas, barulah ditempuh melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini ditegaskan dalam :-

a. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 51 tahun 2009, dimana dalam Pasal 48 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya menyebutkan :

\* Pasal 48 ayat (1) :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan??. . ?.

“ Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ administratif yang tersedia”.- -----

Penjelasan :- -----

“ Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas atas sesuatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur itu dilaksanakan di lingkungan pemerintah sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansilain yang mengeluarkan Keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan”banding administratif”.- -----

\* Pasal 48 ayat

(2) :- -----

----- “ Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya



administratif yang bersangkutan telah digunakan”.- -----

----- Penjelasan :

“ Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh, dan pihak yang bersangkutan masih belum merasa puas, maka barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan”.- -----

b. Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian, dimana dalam Pasal 35 ayat (1),(2) dan (3) menyebutkan :- -----

\* Pasal 35 ayat (1) :- -----

“ Sengketa Kepegawaian diselenggarakan melalui Peradilan Tata Usaha Negara”.- -----

\* Pasal 35 ayat (2) :- -----

“ Sengketa Kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peraturan??...?.  
upaya banding administratif kepada Badan  
Pertimbangan Kepegawaian”.- ---

\* Pasal 35 ayat  
(3) :- -----  
-----

“ Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),  
ditetapkan dengan Peraturan  
Pemerintah”.- -----  
-----

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang  
Disiplin PNS, dimana dalam Pasal 32 Jo Pasal 34 ayat  
(2) huruf a dan b menyebutkan :- -----

\* Pasal  
32 :- -----  
-----

“ Upaya administrasi terdiri dari  
keberatan dan banding  
administrasi”.- -----  
-----

\* Pasal 34 ayat (2) huruf a dan  
b :- -----  
--

“ Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding  
administratif sebagaimana dimaksud Pasal 32  
yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan  
oleh :- -----  
-----

a. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis



hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan e dan;- -

b. Gubernur selaku Wakil Pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan e;- - - - -

5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana pada point 4(empat) perihal Upaya administratif (Pasal 48 beserta penjelasannya) menjelaskan : sehubungan dengan kerancuan penggunaan istilah “keberatan” dalam beberapa peraturan dasar dari instansi/lembaga yang bersangkutan perlu dijelaskan sebagai berikut :

a. Yang dimaksud upaya administratif adalah :- - - - -

1. Pengajuan surat keberatan (bezwaarschrift) yang ditujukan kepada Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan (penetapan/beschiking)

semula;- - - - -

- - - - -

2. Pengajuan surat banding administratif (administratif begroep) yang ditujukan kepada atasan pejabat atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan yang berwenang memeriksa ulang Keputusan Tata Usaha Negara



yang disengketakan..-

b. Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara..-----

c. Apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan terhadap Keputusan tata Usaha Negara yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang..-----

6. Bahwa dalam sengketa ini ternyata PENGGUGAT belum menempuh upaya administrasi baik berupa keberatan maupun banding administrasi, sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo (Pasal 48 ayat(2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009)..-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di antar??..?.

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Pertama-tama Tergugat menolak seluruh dalil gugatan PENGGUGAT secara keseluruhan kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERGUGAT;-----

2. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi, dianggap terbaca kembali dalam Pokok Perkara ini;-----

3. Bahwa posita pada angka 1 dan 2 gugatan PENGGUGAT adalah tidak benar jika dilihat dengan kondisi sekarang, yaitu pasca diterbitkannya objek sengketa oleh TERGUGAT karena status PENGGUGAT bukan lagi sebagai PNS;-----

4. Bahwa posita PENGGUGAT pada angka 3 tidak benar, yang benar adalah kehadiran PENGGUGAT pada tanggal 26 Desember 2005 yang dijemput dan diantar oleh orang tuanya (karena PENGGUGAT bersembunyi/menghilang) adalah dalam rangka menghadiri panggilan Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA) untuk diperiksa karena PENGGUGAT melakukan pelanggaran indisipliner dan pelanggaran hukum lainnya. Kehadiran PENGGUGAT pada tanggal 26 Desember 2005 tersebut bukan dalam rangka masuk kerja;-----

5. Bahwa posita PENGGUGAT pada angka 4 dan 5 adalah benar karena hal tersebut ditempuh oleh Sekretariat DPRD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Demak sesuai dengan mekanisme Peraturan  
Perundang-undangan yang  
berlaku;- -----

10. Bahwa??.?.

6. Bahwa posita PENGGUGAT pada angka 6 tidak benar, yang  
benar adalah sebagaimana jawaban TERGUGAT pada angka  
4;- -----

7. Bahwa posita PENGGUGAT pada angka 7 tidak benar, yang  
benar adalah PENGGUGAT tidak masuk kerja karena  
melakukan tindakan indisipliner, melakukan pelanggaran  
hukum lainnya serta diindikasikan melakukan  
penyelewengan/penyalahgunaan keuangan Negara, sehingga  
tidak logis dan tidak berdasar apabila PENGGUGAT  
berdalih malu masuk kerja karena diumumkan dalam apel  
jika gajinya  
dihentikan;- -----

8. Bahwa posita PENGGUGAT pada angka 8,9,10 dan 11 adalah  
benar. Justru dengan demikian PENGGUGAT mengakui  
sendiri dan menyadari hasil pemeriksaan yang dilakukan  
oleh BAWASDA dan rekomendasi yang berkaitan dengagn  
penyelewengan maupun pengenaan penghukuman disiplin  
yang telah dilakukan oleh BAWASDA telah sesuai dengan  
ketentuandan mekanisme hukum yang berlaku, yang  
kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya objek  
sengketa oleh  
TERGUGAT;- -----

9. Bahwa posita PENGGUGAT pada angka 12 tidak benar, yang  
benar adalah Keputusan Bupati Nomor : 888/305/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(objek sengketa) sudah sangat jelas dan tidak kabur karena keputusan tersebut berdasarkan pada hasil pemeriksaan BAWASDA yang sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-

10. Bahwa posita PENGGUGAT pada angka 13 dan 14 hanya mengulang-ulang seperti posita di atasnya dan sudah terjawab oleh TERGUGAT pada Jawaban Pokok Perkara angka 4 dan 9;-

11. Bahwa posita PENGGUGAT pada angka 15 dan 16 hanya mengulang-ulang seperti posita di atasnya dan sudah terjawab oleh TERGUGAT pada Jawaban Pokok Perkara angka 4 dan 9. Selain itu PENGGUGAT mendalilkan jika TERGUGAT telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, padahal Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dimana dalam Pasal 50 ayat (1) menyebutkan :-

“ Ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



3149) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.- -----

12. Bahwa posita PENGGUGAT pada angka 17, tidak perlu ditanggapi;- -----

13. Bahwa posita PENGGUGAT pada angka 18 dan 19 tidak benar, yang benar adalah objek sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT berdasarkan pada Pasal 12 ayat (1),(2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, BUKAN berdasarkan pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009, sehingga dengan demikian pemberhentian PNS tidak perlu menunggu putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap;- -----

14. Bahwa posita PENGGUGAT pada angka 20 tidak benar, yang benar adalah pemberlakuan objek sengketa memang harus dihitung sejak dihentikannya gaji PENGGUGAT, yaitu dimulai pada bulan Januari 2006;- -----

15. Bahwa posita PENGGUGAT pada angka 21 tidak benar, yang benar adalah penerbitan objek sengketa sudah didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi asas- asas umum pemerintahan yang baik (AAUB), sebagaimana Jawaban TERGUGAT pada Pokok Perkara pada angka 8 dan 9;- -----



16. Bahwa posita PENGGUGAT pada angka 22 dan 23, tidak perlu ditanggapi karena tidak berdasarkan hukum sama sekali.

Berdasarkan uraian Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang belum berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan PENGGUGAT secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Penggugat mengajukan Replik tertanggal 13 Oktober 2010 dan diterima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tanggal 18 Nopember  
2010;- -----

P - 1 : ??..?.

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Tergugat  
mengajukan Duplik tertanggal 25 Nopember  
2010;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil  
gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa  
foto copy surat yang telah dilegalisir serta telah  
bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau  
foto copynya yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 14  
sebagai berikut :

P - 1 : Kartu Tanda Penduduk An. KOEN ENDRO  
NOERTJAHJO,S.Sos. (foto copy sesuai dengan  
aslinya);- -----

P - 2 : Surat Slip gaji tahun 2004 An. KOEN ENDRO  
NOERTJAHJO,S.Sos.(foto copy sesuai dengan  
foto copynya);- -----

P - 3 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 813.3/1258/1998  
beserta Daftar Lampirannya ditetapkan di  
Semarang pada tanggal 2 Mei 1998 Tentang  
Pengangkatan Penggugat sebagai Calon Pegawai  
Negeri Sipil (foto copy sesuai dengan  
aslinya);- -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P - 4 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 821.1/2647/99  
beserta daftar Lampirannya ditetapkan di  
Semarang pada tanggal 25 September 1999  
Tentang Pengangkatan Penggugat sebagai  
Pegawai Negeri Sipil (foto copy sesuai dengan  
aslinya);- -----

P - 5 : Surat Pemerintah Daerah Tingkat II Demak  
Nomor : 822.3/201/1.99 tertanggal 13 Desember  
1999 perihal Kenaikan Gaji Berkala (foto copy  
sesuai dengan  
aslinya);- -----

P - 6 : Surat Pemerintah Daerah Tingkat II Demak  
Nomor : 882.3/355/1.2001 tertanggal 31  
Desember 2001 perihal Kenaikan Gaji Berkala  
(foto copy sesuai dengan  
aslinya);- -----

P - 7 : Petikan Keputusan Bupati Demak Nomor :  
823/40/2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai  
Negeri Sipil Bupati Demak ditetapkan di Demak  
pada tanggal 15 April 2002 (foto copy sesuai  
dengan foto  
copynya);- -----

P - 8 : Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Demak  
Kantor Kepegawaian Daerah Nomor :  
822.3/395/2003 tertanggal 31 Desember 2003,  
Perihal Kenaikan Gaji Berkala (foto copy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan aslinya);- -----  
P - 9 : Surat Keputusan Bupati Demak Nomor :  
821.2/183/2004 ditetapkan di Demak pada  
tanggal 26 Oktober 2004 Tentang Penunjukan  
Sdr. KOEN ENDRO NOERTJAHJO,S.Sos. NIP. 500  
105 855 Penata Muda TK I (III/b) staf pada  
Sekretariat DPRD Kabupaten Demak sebagai Yang  
Menjalankan Tugas (YMT) Kasubbag. Keuangan  
Pada Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten  
Demak (foto copy sesuai dengan  
aslinya);- -----

-----  
P - : Surat Keputusan Bupati Demak Nomor :  
10 888/305/2009 ditetapkan di Demak pada tanggal  
5 Maret 2009 tentang Pemberhentian Tidak  
Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil  
An. KOEN ENDRO NOERTJAHJO,S.Sos. NIP.  
500105855 (foto copy sesuai dengan  
aslinya);- -----

-----  
P - : Surat Somasi Hukum dari Penggugat kepada  
11 Tergugat tertanggal 18 Agustus 2010 (foto  
copy sesuai dengan  
aslinya);- -----

P - : Surat Pemerintah Kabupaten Demak Sekretariat  
12 DPRD Nomor : 862/729 A tertanggal 14 Oktober  
2005, Perihal Panggilan I kepada Penggugat  
guna menyelesaikan tugas yang menjadi  
tanggung jawab Penggugat (foto copy sesuai  
dengan



aslinya);- -----  
P - : Surat Pemerintah Kabupaten Demak Sekretariat  
13 DPRD Nomor : 862/763 tertanggal 21 Oktober  
2005, Perihal Panggilan II kepada Penggugat  
Menimbang, ??..?.  
guna menyelesaikan tugas yang menjadi  
tanggung jawab Penggugat khususnya masalah  
administrasi keuangan (SPJ) (foto copy sesuai  
dengan  
aslinya);- -----

-----  
P - : Surat Pemerintah Kabupaten Demak Sekretariat  
14 DPRD Nomor : 862/792 tertanggal 27 Oktober  
2005, Perihal Panggilan III kepada Penggugat  
guna menyelesaikan tugas yang menjadi  
tanggung jawab Penggugat khususnya masalah  
administrasi keuangan (SPJ) mulai bulan Juli  
2005 (foto copy sesuai dengan  
aslinya);- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil  
bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa  
foto copy surat yang telah dilegalisir dan telah bermeterai  
cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya  
yang ditandai dengan T - 1 sampai dengan T - 29 sebagai  
berikut : -----

T - 1 : Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara (foto copy sesuai  
dengan foto  
copynya);- -----

T - 2 : Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang  
Perubahan atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (foto  
copy sesuai dengan foto  
copynya);- -----  
T - 3 : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun  
1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa  
Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun  
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
(foto copy sesuai dengan  
aslinya);- -----  
-----  
T - 4 : Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979  
tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil  
(foto copy sesuai dengan  
aslinya);- -----  
T - 5 : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010  
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (foto  
copy dari  
internet);- -----  
T - 6 : Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 04/SE/1980,  
tanggal 11 Februari 1980 tentang  
Pemberhentian PNS (foto copy sesuai dengan  
aslinya);- -----  
-----  
T - 7 : Daftar Hadir Absen 26 Desember 2005 (foto  
copy sesuai dengan  
aslinya);- -----  
-----  
T - 8 : Surat YMT, Sekretaris DPRD, Nomor : 862/729  
A, Tanggal 14 Oktober 2005, Perihal Panggilan  
Kesatu (foto copy sesuai dengan  
aslinya);- -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2005, ??.?.?.  
putusan.mahkamahagung.go.id

- T - 9 : Surat YMT, Sekretaris DPRD, Nomor : 862/763,  
Tanggal 21 Oktober 2005, Perihal Panggilan  
Kedua (foto copy sesuai dengan aslinya);- ----
- T - : Surat YMT, Sekretaris DPRD, Nomor : 862/792,  
10 Tanggal 27 Oktober 2005, Perihal Panggilan  
Ketiga (foto copy sesuai dengan aslinya);- ---
- T - : Surat YMT, Sekretaris DPRD, Nomor : 862/866,  
11 Tanggal 23 November 2005, Perihal Laporan  
Pelanggaran Disiplin PNS (foto copy sesuai  
dengan  
aslinya);- -----
- T - : Surat YMT, Sekretaris DPRD, Nomor : 800/947,  
12 Tanggal 6Desember 2005, Perihal Penghentian  
Gaji An. Sdr. Koen Endro Noertjahjo, S.Sos.  
NIP. 500105855 (foto copy sesuai dengan  
aslinya);- -----
- T - : Surat Pernyataan Penggugat pada Pemeriksaan  
13 Pertama oleh BAWASDA Kabupaten Demak, Tanggal  
26 Desember 2005 (foto copy sesuai dengan  
foto  
copynya);- -----
- T - : Berita Acara BAWASDA Kabupaten Demak, Tanggal  
14 30 Desember 2005 (foto copy sesuai dengan  
aslinya);- -----
- T - : Daftar Gaji Pegawai Negeri Sipil Kabupaten  
15 Demak, Bulan/Tahun : Januari 2006, Lokasi  
Kerja : Sekretariat Dewan (foto copy sesuai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan foto  
aslinya); ??...?.  
copynya);- -----

T - : Laporan Hasil Pemeriksaan BAWASDA Demak Nomor  
16 : 356/06/K/2006/RHS, Tanggal 6 Maret 2006  
(foto copy sesuai dengan  
aslinya);- -----

T - : Surat BAWASDA Kabupaten Demak, Nomor :  
17 336/55/Rhs, Tanggal 15 Mei 2006, Perihal :  
Rekomendasi Pengenaan Hukuman Disiplin (foto  
copy sesuai dengan  
aslinya);- -----

T - : Berita Acara Tim Pembina Disiplin Pegawai  
18 Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Demak, Nomor : 845.1/008/2006,  
Tanggal 14 September 2006 (foto copy sesuai  
dengan aslinya);- -----

T - : Surat PLT, Sekretaris Daerah Kabupaten Demak,  
19 Nomor : 800/1972, Tanggal 25 September 2006,  
Perihal : Tindaklanjut Kasus Sdr. Koen Endro  
Noertjahjo, S.Sos (Peringatan Kesatu) (foto  
copy sesuai dengan  
aslinya);- -----

T - : Surat YMT, Sekretaris DPRD Kabupaten Demak,  
20 Nomor : 800/005, Tanggal 26 September 2006,  
Perihal : Pengembalian Uang Daerah  
(Tindaklanjut Peringatan Kesatu) (foto copy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya);-  
T - : Surat PLT, Sekretaris Daerah Kabupaten Demak,  
21 Nomor : 800/2567/2006, Tanggal 20 Desember  
2006, Perihal : Peringatan II Kasus Sdr. Koen  
Endro Noertjahjo,S.Sos (Peringatan Kedua)  
(foto copy sesuai dengan  
aslinya);- -----

-----  
T - : Surat YMT, Sekretaris DPRD Kabupaten Demak,  
22 Nomor : 800/007, Tanggal 22 Desember 2006,  
Perihal : Peringatan II ( Tindaklanjut  
Peringatan Kedua) (foto copy sesuai dengan  
aslinya);- -----

T - : Surat PLT. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak,  
23 Nomor : 800/345, Tanggal 26 Februari 2007,  
Perihal Peringatan III Kasus Sdr. Koen Endro  
Noertjahjo,S.Sos (Peringatan Ketiga) (foto  
copy sesuai dengan  
aslinya);- -----

-----  
T - : Surat YMT, Sekretaris DPRD Kabupaten Demak,  
24 Nomor : 800/001/R, Tanggal 27 Februari 2007,  
Perihal : Peringatan III (Tindaklanjut  
Peringatan Ketiga) (foto copy sesuai dengan  
aslinya);- -

T - : Nota Dinas Kepala KKD kepada Bupati Demak,  
25 Nomor : 862/180, Tanggal 20 November 2007,  
Perihal : Hasil Rapat Tim Pembina Disiplin  
PNS Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak  
tanggal 2 November 2007 (foto copy sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan aslinya);-----
- T - : Nota Dinas Kepala BAWASDA kepada Bupati  
26 Demak, Nomor : 700/291/RHS/2008, Tanggal 28  
November 2008, Perihal : Penanganan Kasua  
Penyelesaian... Sdr. Koen Endro  
Noertjahjo, S.Sos (YMT. Kasubbag Keuangan  
Merangkap Pemegang Kas Pada Sekwan DPRD  
Kabupaten Demak) (foto copy sesuai dengan  
aslinya);-----
- 
- T - : Nota Dinas Kepala BKD kepada Bupati Demak,  
27 Nomor : 888/32, tanggal 9 Februari 2009,  
Perihal : Pemberhentian Dengan Tidak Hormat  
Sebagai PNS An. Sdr. Koen Endro  
Noetjahjo, S.Sos. NIP. 500105855 (foto copy  
sesuai dengan  
aslinya);-----
- T - : Daftar Hadir Absen Unit Kerja Sekretariat  
28 DPRD Kabupaten Demak, Tanggal 1, 15 dan 29  
September 2005. 3, 14 dan 31 Oktober 2005. 7,  
17 dan 30 November 2005. 1, 15 dan 30  
Desember 2005. 2, 16 dan 30 Januari 2006. 3,  
15 dan 28 Februari 2006. 1, 15 dan 29 Maret  
2006 (foto copy sesuai dengan  
aslinya);-----
- T - : Petikan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor  
29 : 179/Pid.B/2010/PN.Dmk Tanggal 14 Desember  
2010 (foto copy sesuai dengan  
aslinya);-----
-



Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Penggugat tidak mengajukan bukti keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Tergugat mengajukan bukti keterangan saksi 3 ( Tiga ) orang yang disumpah dan berjanji menurut agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut :

**Saksi 1. Ahmad Nur Wahyudi,SH. menerangkan dibawah**

**sumpah :** -----

- Bahwa saksi tahu dihadirkan sebagai saksi berkaitan dengan perkara pemberhentian Koen Endro Noertjahjo,S.Sos sebagai

PNS;-----

- Bahwa saksi tidak tahu nomor, bulan dan tahun SK.Pemberhentian Penggugat ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat;-----

- Bahwa saksi tahu adanya pemberhentian Penggugat pada saat persiapan akan dijadikan saksi karena ada gugatan yang diajukan oleh Koen Endro Noertjahjo;-----

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Koen di Sekretariat DPRD sekitar awal tahun 2005;-----

- Bahwa saksi dinas di Sekretariat DPRD Demak sejak Mei 2005 sampai Mei 2009;---

- Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat bulan Mei sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2005; -----

- Bahwa jabatan Penggugat sebagai YMT. Kasubbag Keuangan

di Sekretariat

DPRD

Demak;- -----

- Bahwa Penggugat menjabat sebagai YMT. Keuangan sejak

bulan Maret 2005;- -----

- Bahwa saksi tahu Penggugat selama menjabat YMT. tidak

melaksanakan tugas;- -----

- Bahwa Penggugat tidak melaksanakan tugas sejak September

2005 pada waktu memegang kas DPRD karena setiap bulan

harus membuat laporan SPJ keuangan mengenai pembiayaan

rutin dan sekitar biaya- biaya

DPRD;- -----

- Bahwa Penggugat mulai bulan Juli dan Agustus 2005 sudah

mulai sering tidak masuk

kerja ;-----

- Bahwa atasan langsung dari Penggugat adalah Kabag

Umum;- -----

- Bahwa saksi sebagai atasan langsung pernah membuat

teguran kepada Penggugat;- ---

- Bahwa Penggugat tidak masuk kerja mulai tanggal 29

September 2005;-----

- Bahwa saksi pernah membuat teguran baik secara lisan

maupun secara tertulis kepada

Penggugat ;-----

- Bahwa isi dari teguran secara tertulis yang dibuat saksi

adalah menyarankan supaya hadir untuk melaksanakan

kewajiban-

kewajibannya ;-----

- Bahwa saksi membuat teguran secara tertulis kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebanyak 3(tiga) kali yaitu teguran I pada tanggal 14 Oktober 2005, teguran II pada tanggal 21 Oktober 2005, teguran III pada tanggal 27 Oktober 2005 dan semua teguran tidak ada respon dan tidak mengerjakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;-----

- Bahwa saksi membuat surat pelimpahan kepada Bupati mengenai kasus Koen setelah Penggugat dipanggil 3(tiga) kali tidak ada respon;-----

- Bahwa saksi melaporkan kepada Bupati mengenai kasus Koen pada tanggal 23 Nopember 2005;-----

- Bahwa isi laporan yang disampaikan saksi kepada Bupati mengenai yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu tidak melaksanakan tugas dan ada indikasi penyalahgunaan keuangan karena belum dapat melakukan tanggung jawab mengenai keuangan;-----

- Bahwa tindaklanjut yang dilakukan oleh Bupati setelah ada laporan dari saksi yaitu Bawasda akan melaksanakan pemeriksaan kepada yang bersangkutan ;-----

- Bahwa pemeriksaan dari Bawasda dilakukan pada tahun 2006;-----

- Bahwa yang diperiksa oleh Bawasda adalah rekan kerja Koen;-----

- Bahwa ada 3(tiga) orang dari Bawasda yang memeriksa yaitu Lilik Iskandar, Wilopo Aji, dan Pak Darmanto;-----

- Bahwa saksi lupa berapa lama pemeriksaan yang dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bawasda terhadap rekan kerja

Penggugat ;-----

- Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawasda disampaikan pada awal tahun 2006;-----

- Bahwa isi dari hasil pemeriksaan adalah Peggugat tidak masuk kerja selama 6(enam) bulan berturut- turut dan diindikasikan menyalahgunakan keuangan karena belum dapat mengSPJkan keuangan sebesar Rp. 281.000.000,- ;-----

- Bahwa setelah mengetahui hasil pemeriksaan tersebut saksi selaku sekretaris DPRD membuat usulan untuk menghentikan gaji yang bersangkutan ;

- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2005 saksi membuat usulan penghentian gaji Peggugat;-----

- Bahwa saksi tidak tahu kapan SK. pemberhentian gaji Peggugat itu diterbitkan tetapi untuk realisasinya 1(satu) bulan semenjak usulan pemberhentian gaji;-----

- Bahwa pada bulan berikutnya nama Koen sudah tidak ada dalam daftar gaji ;-----

- Bahwa sesuai ketentuan tidak ada kewajiban untuk memberitahukan kalau gajinya diberhentikan;-----

- Bahwa Peggugat tidak pernah hadir setelah gajinya diberhentikan ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak hadir pada tanggal 26 Desember 2005; -----  
Bahwa??..?.

- Bahwa saksi tahu kalau pada tanggal 26 Desember 2005 ada pemeriksaan dari Bawasda karena sebelum melakukan pemeriksaan mohon kepada saksi tetapi saksi tidak mengikuti pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawasda;-----

- Bahwa yang dilakukan Tim Bawasda setelah Penggugat diperiksa yaitu beberapa bulan setelah pemeriksaan ada surat dari Sekretariat Daerah yang ditujukan kepada Sekretaris DPRD perihal tindaklanjut kasus Koen yang isinya untuk memberitahukan kepada Koen supaya mengembalikan uang daerah yang telah digunakan untuk kepentingan pribadi ;-----

- Bahwa tindaklanjut dari Tim Bawasda dilakukan pada tanggal 25 September 2006 yang ditujukan kepada Sekretaris Dewan;-----

- Bahwa yang dilakukan saksi setelah menerima surat dari sekretariat daerah yaitu disampaikan kepada Penggugat tetapi Penggugat tidak ada ditempat dan yang menerima keluarganya;-----

- Bahwa saksi menyampaikan surat dari Sekretariat Daerah kepada Penggugat sebanyak 3(tiga) kali yaitu yang I pada tanggal 25 September 2006 ditindaklanjuti oleh Sekretariat DPRD tanggal 26 September 2006, yang II pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ??..?.

tanggal 20 Desember 2006 ditindaklanjuti oleh Sekretariat DPRD tanggal 22 Desember 2006, yang III pada tanggal 26 Pebruari 2007 ditindaklanjuti oleh Sekretariat DPRD tanggal 27 Pebruari 2007 dan isi dari surat- surat tersebut supaya Sdr. Koen segera mengembalikan uang daerah yang telah digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 281.000.000,- ;-----

- Bahwa surat yang disampaikan Penggugat dikirim melalui kurir dan setelah pihak keluarga yang menerima surat tersebut tidak ada jawaban dari keluarganya;-----
- Bahwa saksi lupa kapan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Bawasda disampaikan kepada saksi ;-----
- Bahwa dari 3(tiga) kali pemberitahuan yang disampaikan kepada Penggugat, tidak pernah ada tindaklanjut dan juga tidak pernah hadir;-----
- Bahwa usulan rekomendasi pemberhentian yang dilakukan terhadap kasus Penggugat;-----
- Bahwa yang menjadi dasar usulan pemberhentian terhadap Penggugat karena melanggar disiplin, tidak masuk kerja selama 6(enam) bulan berturut- turut;-----
- Bahwa saksi 4(empat) bulan yang lalu, diperiksa dalam perkara tindak pidananya dan dihadirkan sebagai saksi oleh jaksa;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sekarang sebagai tahanan

kejaksaan ;-----

- Bahwa perkara tersebut sekarang sudah diputus dan

Penggugat mendapat hukuman 2(dua)

tahun;-----

- Bahwa saksi mengetahui perkara tersebut sudah diputus

dengan membaca Koran Harian Semarang tetapi tanggalnya

lupa;-----

- Bahwa Tim Pembina Disiplin PNS dilingkungan Pemerintah

Kabupaten Demak dibentuk oleh Bupati dan pada saat

dibentuk pada tahun 2007 saksi menjabat sebagai Kabag

Hukum merangkap

YMT.Sekwan;-----

- Bahwa tugas dari Tim adalah membahas masalah pelanggaran

disiplin yang dilakukan PNS dilingkungan Kabupaten

Demak;-----

- Bahwa rapat dari Tim Pembina Disiplin PNS berkaitan

dengan salah satunya kasus

Koen;-----

- Bahwa hasil rapat Tim Pembina Disiplin PNS terhadap

kasus Penggugat mengusulkan kepada Bupati untuk

diberhentikan sebagai PNS;-----

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa terlalu lama antara

Penggugat tidak masuk kerja bulan September 2005 dan

awal tahun 2006 sudah tidak menerima gaji sedangkan SK.

Pemberhentian Penggugat baru dibuat Maret

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009;- -----

- Bahwa saksi tidak tahu kalau uang yang diselewengkan oleh Penggugat sudah diserahkan ke kas negara;- -----

- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Sekwan mulai Mei 2009 Penggugat belum menyerahkan uang tersebut kepada kas negara;- -----

- Bahwa surat- surat yang dikirim Sekda ke Sekwan berkaitan dengan Penggugat tidak masuk kerja, yaitu hanya pada teguran I ada respon keluarganya yaitu ayahnya menghadap kepada saksi dan memberitahukan keberadaan anaknya kadang di Kudus kadang di Semarang;- -----

- Bahwa saksi mengatakan kepada ayahnya supaya Koen masuk kerja dan melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;- -----

Bahwa saksi pernah menelpon kepada ayahnya tentang keberadaan Koen sekitar 2(dua) minggu setelah ayahnya menghadap saksi dan jawaban dari ayahnya belum ketemu

- dengan putranya dan belum dapat menyampaikan pesan dari saksi untuk masuk kerja dan melaksanakan tugas yang menjadi jawabnya;- -----

Bahwa saksi tahu dari hasil pemeriksaan Tim Bawasda yang menyatakan ada indikasi penyalahgunaan keuangan daerah sebesar Rp. 281.000.000,- ;-----

Bahwa pada waktu saksi diperiksa dalam perkara pidana Penggugat, saksi tidak tahu k kalau uang sebagai alat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti;- -----

Saksi 2. D a r m a n t o, SH. menerangkan dibawah

janji;- -----

- Bahwa sejak tahun 2003 saksi menjabat sebagai auditor

pemeriksa;- -----

- Bahwa saksi tahu dipanggil disini berkaitan dengan

sengketa pemberhentian

Sdr.Koen;- -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan

Penggugat;- -----

--

- Bahwa sejak tanggal 26 Desember 2005 saksi mengaudit di

Sekretaris Dewan berkaitan dengan perkara

Penggugat;- -----

- Bahwa pada waktu saksi mengaudit di Sekretaris Dewan ada

surat tugasnya;- -----

- Bahwa ada 4(empat) orang yang mengaudit di Sekretaris

dewan yaitu Lilik Iskandar, Darmanto, Wilopo Aji dan

Suharso tetapi Suharso tidak ikut

memeriksa;- -----

- Bahwa saksi menemui pimpinan yang bernama Ahmad Nur

Wahyudi sebagai Sekretaris Dewan dan Muchlis sebagai

bendahara pada waktu akan memeriksa;- -----

- Bahwa Tim Bawasda mau memeriksa karena ada surat dari

Sekretaris Dewan;- -----

- Bahwa saksi memeriksa Muchlis sebagai bendahara dan yang

diperiksa berkas- berkas administrasi

keuangan;- -----

- Bahwa pelaksanaan audit mulai tanggal 26 sampai 30

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2005 tetapi

berselang;- -----

- Bahwa pada hari pertama belum bisa menemukan karena  
kekurangan data;- -----

- Bahwa pada waktu pemeriksaan berakhir tanggal 30  
Desember 2005 dan setelah dicocokkan dengan berkas-  
berkas administrasi keuangan ternyata ada penyimpangan  
uang dan uang itu tidak ada, menurut perhitungannya Koen  
menggunakan uang sebesar kurang lebih Rp. 281.000.000,-  
untuk kepentingan pribadi dan tidak bisa  
dipertanggungjawabkan;- -----

- Bahwa laporan hasil temuan dibuat tanggal 6 Maret 2006  
dan diserahkan ke bagian TU selanjutnya TU yang  
menyerahkan langsung kepada

Bupati;- -----

- Bahwa setelah membuat laporan hasil temuan yang  
diserahkan ke bagian TU selanjutnya tugas dari saksi  
selesai;- -----

- Bahwa yang memerintahkan Penggugat hadir untuk diperiksa  
adalah Sekretaris

Dewan;- -----

- Bahwa pada waktu diperiksa Penggugat hadir diantar oleh  
orang tuanya tetapi Penggugat diperiksa  
sendiri;- -----

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat membuat surat  
pernyataan untuk mengembalikan uang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut;- -----

- Bahwa dari Penggugat tidak ada perkembangan setelah Tim  
Pemeriksa membuat laporan kepada  
Bupati;- -----

- Bahwa pada waktu pemeriksaan di Sekwan tim audit datang  
lebih dahulu dari pada  
Koen;- -----

- Bahwa pemeriksaan dilakukan pada hari Senin dan Koen  
memakai pakaian seragam dinas (hansip) karena dipanggil  
masih berstatus sebagai  
PNS;- -----

- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat menjadi tahanan di PN.

Demak;- -----

**Saksi 3. Agung Hidayanto, menerangkan dibawah**

**sumpah;- -----**

- Bahwa jabatan saksi sebagai PNS adalah sebagai Kepala  
Bidang Umum pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan  
sekarang telah berubah menjadi Kantor Kepegawaian Daerah  
(KKD);- -----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Umum sejak  
Pebruari 2009;- -----

- Bahwa perubahan nama dari BKD menjadi KKD sejak tahun  
2009;- -----

- Bahwa saksi tahu dihadirkan oleh Tergugat berkaitan  
dengan gugatan yang diajukan di Pengadilan TUN tentang  
SK.Pemberhentian sebagai PNS an. Koen Endro  
Noertjahjo, S.Sos.

(Penggugat);- -----



-----  
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat diberhentikan sebagai PNS karena tidak masuk kerja lebih dari 6(enam) bulan berturut-

turut;-----

- Bahwa saksi yang mengkonsep SK.Pemberhentian Penggugat;-----

- Bahwa SK.Pemberhentian itu dikonsep pada awal Januari 2009 dan diterbitkan pada bulan Maret 2009;-----

-----  
- Bahwa alasan pada waktu mengkonsep SK.Pemberhentian Penggugat karena Koen menggunakan uang daerah dan tidak masuk kerja selama lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut sehingga sesuai dengan PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS dan PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS;--

- Bahwa pada waktu menangani kasus Penggugat Tim Pembina Disiplin PNS sudah terbentuk dan Tim hanya memberikan saran saja;-----

- Bahwa Tim Pembina tersebut dibentuk berdasarkan SK. Bupati dan mulai bekerja tanggal 14 September 2006;-----

-----  
- Bahwa Tim bekerja menurut permintaan dari Bawasda selanjutnya Tim mengadakan rapat pada tanggal 14 September

2006;-----

-----  
- Bahwa susunan kepengurusan Tim Pembina Disiplin PNS terdiri dari ketua, sekretaris dan beranggotakan 13



(tigabelas)

orang;- -----

- Bahwa hasil rapat yang dilakukan oleh Tim tersebut menyarankan membuat surat teguran kepada Sdr. Koen dan

untuk menyelesaikan masalah keuangan;- -----

- Bahwa Tim dibentuk untuk menangani semua pelanggaran disiplin PNS;- -----

- Bahwa setelah upaya penagihan uang kepada Koen tidak dipenuhi kemudian Tim mengadakan rapat pada tanggal 2 Nopember 2007 dan hasil rapat tersebut memberikan pertimbangan kepada Bupati jenis hukuman dan tindaklanjut terhadap pelanggaran disiplin tersebut;- -----

- Bahwa pada rapat ke 2(dua) ada beberapa orang yang diperiksa termasuk Penggugat;-

- Bahwa yang dilakukan Sekda terhadap Penggugat yaitu membuat beberapa surat yaitu surat 1 pada tanggal 25 September 2006, surat ke 2 pada tanggal 20 Desember 2006 dan surat ke 3 pada tanggal 26 Pebruari 2007 yang ketiga surat tersebut isinya sama yaitu surat yang dutujukan kepada Sektretaris DPRD untuk meneruskan ke Penggugat agar Penggugat mengembalikan uang daerah yang telah digunakan untuk kepentingan pribadi;- -----

- Bahwa dari Sekwan telah membuat surat teguran kepada Penggugat tetapi tidak ada tanggapan dari Koen dan ditunggu sampai Nopember 2007 tetap Koen tidak pernah datang untuk menyelesaikan masalahnya dan Tim mengadakan rapat membahas masalah Koen dan hasil rapat menyarankan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan pemberhentian terhadap

Koen;- -----

- Bahwa setelah mendapat persetujuan dari Bupati kemudian

saksi memprosesnya;- ----

- Bahwa yang menjadi alasan pedoman untuk menyatakan TMT

adalah Surat Edaran BAKN Nomor 04/SE/1980 pada romawi

VII angka 3 yang menyatakan bahwa PNS yang selama

6(enam) bulan atau lebih terusmenerus meninggalkan

tugasnya secara tidak sah diberhentikan tidak dengan

hormat sebagai PNS;- -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak awal menjadi

PNS karena ruangan saksi dengan Koen

bersebelahan;- -----

- Bahwa saksi tidak tahu proses pidana Penggugat sudah

selesai atau belum;- -----

- Bahwa yang menjadi dasar tim dalam pemberhentian

Penggugat karena Koen tidak masuk kerja selama 6 (enam)

bulan berturut-

turut;- -----

- Bahwa tupoksi dari Kepala Seksi menangani bidang

pembinaan pegawai dan

kesejahteraan;- -----

- Bahwa lama proses pembuatan SK. mulai surat masuk sampai

penerbitan SK. belum ada

standarnya;- -----

- Bahwa seharusnya SK. Pemberhentian Penggugat tidak

selama itu;- -----

- Bahwa dalam pembuatan SK.bisa dilakukan dalam jangka

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) minggu apabila tidak melibatkan pihak luar;-

- Bahwa dalam penerbitan SK. yang berkaitan dengan perkara ini tidak lebih dari 3(tiga) bulan;-

- Bahwa proses penerbitan SK.yang lama itu dalam rangka memberikan kesempatan kepada Sdr.Penggugat untuk mengembalikan uang yang digunakan;-

- Bahwa Koen tidak pernah mengajukan upaya keberatan tentang penerbitan SK tersebut;-

- Bahwa saksi telah mengetahui ketentuan Pasaal 12 ayat 3 PP 32 Tahun 1979 yang mendasari pemberhentian Penggugat karena selama 6(enam) bulan berturut- turut tidak masuk kerja dan telah dirubah menjadi PP Nomor 53 Tahun 2010 dan PP yang baru tersebut mulai berlaku sejak 6 Juni 2010;-

- Bahwa SK. Bupati sebagai dasar hukum dibentuknya Tim Disiplin PNS di Kabupaten Demak dan SK. tersebut berlaku selama- lamanya dan tidak ada batas waktunya;-

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 30 Desember 2010;-

Menimbang, bahwa kemudian tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh para pihak dan selanjutnya mohon Putusan dan segala sesuatu tertuang dalam berita acara telah dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ;- ----- Menimbang; ?? : ? :-

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah : Surat Keputusan Bupati Demak Nomor : 888/305/2009 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. KOEN ENDRO NOERTJAHJO,S.Sos. NIP. 500105855 tertanggal 5 Maret 2009;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyerahkan jawaban tertanggal 28 Oktober 2010 yang berisi tentang eksepsi dan pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;-----

DALAM

EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat seharusnya menempuh upaya administrasi sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, apabila upaya administrasi sudah ditempuh dan Penggugat masih belum puas barulah Penggugat menempuh melalui jalur di Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahwa oleh karena Penggugat belum menempuh upaya administrasi baik keberatan maupun banding administrasi, maka Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;- -----

Menimbang, bahwa terhadap <sup>Sipi / 22 / 2010</sup> dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan sanggahannya di dalam replik tertanggal 13 Oktober 2010 yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi Tergugat untuk seluruhnya sedangkan Tergugat dalam dupliknya tanggal 25 November 2010 pada pokoknya menolak dalil replik Penggugat, dan tetap pada jawaban Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan bantahan Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:- -----

Menimbang, bahwa dari alasan Tergugat sebagaimana tersebut di dalam eksepsinya dapat disimpulkan “bahwa Tergugat mengajukan eksepsi mengenai upaya administratif yang menyangkut kewenangan absolut Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “*Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan” serta ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang menyatakan “Sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian” ;-*

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim eksepsi Tergugat tersebut termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan, oleh karenanya perlu diuji apakah upaya administratif diperlukan untuk menyelesaikan sengketa a quo karena berkait erat dengan ketentuan Pasal 50 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu *“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama” ;-*

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Demak Nomor : 888/305/2009 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. KOEN ENDRO NOERTJAHJO,S.Sos.

NIP. 500105855 tertanggal 5 Maret 2009; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari objek sengketa tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Demak yang diberhentikan tidak dengan hormat dengan Keputusan Bupati Demak karena meninggalkan tugas selama enam bulan secara berturut-turut dengan mendasarkan pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tidak dengan hormat yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ada upaya banding administrasi ataukah tidak, sehingga perlu untuk mengetahui sejauh mana kewenangan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dalam memeriksa upaya banding administrasi;- -----

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (3) Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 menyebutkan bahwa "*Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah*" ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal (2) Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian dapat diketahui kewenangan BAPEK, yaitu sebagai berikut;- -----



-----  
a. *Memeriksa dan mengambil keputusan mengenai keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina, golongan ruang IV/a ke bawah tentang hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, sepanjang mengenai hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;*-----

b. *Memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai usul penjatuhan hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ke atas serta pembebasan dari jabatan bagi Pejabat Eselon I, yang diajukan oleh Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non*  
*Departemen;*-----  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a quo bukan didasarkan pada *Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980*, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 PP Nomor 67 Tahun 1980 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa keputusan a quo dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin yang tidak memerlukan upaya banding administrasi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DALAM** ???..?.

sehingga oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama berwenang, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara a quo;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;- -----

**DALAM** **POKOK**  
**PERKARA**- -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Demak Nomor : 888/305/2009 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. KOEN ENDRO NOERTJAHJO,S.Sos.

NIP. 500105855 tertanggal 5 Maret 2009 (bukti P-10);- -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa semestinya tidak didasarkan pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan seharusnya didasarkan pada Pasal 23 ayat (5) C Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi ??..?.

Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian serta pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat yang berlaku surut, sehingga Penggugat menganggap Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa a quo tidak sah;- -

Menimbang, bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan mohon agar surat keputusan objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah. Untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup diberi tanda P – 1 s/d P – 14 dan tidak mengajukan saksi;- -----

Menimbang, bahwa sebaliknya dalil- dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat kecuali hal yang diakui secara tegas dan tidak terbantahkan bahwa benar Tergugat telah menerbitkan keputusan objek sengketa a quo. Untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup diberi tanda T – 1 s/d T – 29, dan mengajukan 3(tiga) orang saksi;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan: *“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban Pembuktian beserta penilaian Pembuktian, dan untuk sahnya Pembuktian diperlukan sekurang- kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”*;- -----

-----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil bantahan Tergugat serta bukti- bukti yang diajukan di persidangan menurut hemat Majelis Hakim apa yang menjadi persoalan atau masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah apakah dalam penerbitan surat keputusan objek sengketa oleh Tergugat mengandung cacat yuridis baik dari segi kewenangan, prosedur maupun dari segi substansi sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah, ataukah sebaliknya telah sesuai sehingga harus dipertahankan

legalitasnya;- -----  
-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, sebelum mempertimbangkan dari segi kewenangan, segi formal prosedural, dan segi substansi materiilnya, Majelis Hakim akan menilai dalil Tergugat tentang Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa semestinya tidak didasarkan pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil akan tetapi seharusnya didasarkan pada Pasal 23 ayat (5) C Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok- Pokok Kepegawaian;- -----  
-----

Menimbang, bahwa Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok- Pokok Kepegawaian Pasal 23 ayat (5) C menyatakan :  
*“Pegawai Negeri Sipil Diberhentikan tidak dengan hormat karena : dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan” ;*-----

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab dan bukti- bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa meskipun Penggugat pada saat itu sedang Menimbang, ??..?. menjalani proses persidangan perkara pidana, namun alasan pemberhentian Penggugat bukanlah hal tersebut melainkan dikarenakan Penggugat telah tidak masuk kantor selama lebih dari enam bulan secara berturut- turut tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut undang- undang, sehingga oleh karenanya pengujian keputusan objek sengketa a quo akan didasarkan pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang pada saat diterbitkannya keputusan objek sengketa, masih berlaku;-----

-----  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kewenangan, segi formal prosedural, dan segi substansi materiilnya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi kewenangan terlebih dahulu, tentang kewenangan Tergugat menerbitkan surat keputusan a quo dapat dilihat dalam konsideran surat keputusan a quo, yakni mengacu kepada beberapa peraturan perundang- undangan yang menjadi sumber kewenangan Tergugat di dalam menerbitkan surat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan a quo, antara lain Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

disebutkan:- -----

-----

*1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten / Kota menetapkan:- -----*

*a. Pemberhentian calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungannya;- -----*

*b. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah dilingkungannya;- -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disebutkan, maka menjadi kewenangan Tergugat sebagai Pejabat TUN yang berwenang untuk memberhentikan Peggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan kerja Tergugat;- -----



-----  
Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dari segi kewenangan, selanjutnya akan mempertimbangkan dari segi prosedur formal sekaligus dari segi substansi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan dikeluarkannya objek sengketa a quo;- -----

Menimbang, bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil didasarkan kepada ketentuan Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi sebagai berikut:- -----

- 
- 1) *Pegawai Negeri Sipil yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 2(dua) bulan terus menerus, dihentikan pembayaran gajinya mulai bulan ketiga;- ---*
  - 2) *Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan melaporkan diri kepada pimpinan instansinya dapat:- --*
    - a. *Ditugaskan kembali apabila ketidakhadirannya itu karena ada alasan-alasan yang dapat diterima; atau;- -----*
    - b. *Diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila ketidakhadirannya itu adalah karena kelalaian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan menurut pendapat pejabat yang berwenang akan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengganggu suasana kerja, jika ia ditugaskan kembali;- -----*

Penggugat??..?.

3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat

*(1) yang dalam waktu 6(enam) bulan terus menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;- -----*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena keseluruhan pasal tersebut dapat dibaca sebagai proses prosedural formil pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena meninggalkan tugas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara keseluruhan untuk mendapatkan kebenaran materiil;- -----

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh dari persidangan bahwa Penggugat tidak masuk kerja selama 2(dua) bulan berturut- turut hal tersebut dibuktikan dari Daftar Hadir Absen Unit Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak (Bukti T-28) dan dibenarkan oleh kesaksian saksi AHMAD NUR WAHYUDI,SH. yang menyatakan Penggugat sudah mulai sering tidak masuk kerja di bulan Juli sampai Agustus 2005, dan Penggugat benar- benar tidak pernah masuk kerja mulai tanggal 29 September 2005 hingga pada tanggal 6 Desember 2005 dikeluarkan Surat YMT, Sekretaris DPRD, Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/947, tanggal 6 Desember 2005, Perihal Penghentian Gaji An. Sdr. Koen Endro Noertjahjo, S.Sos. NIP. 500105855 mulai 1 Januari 2006 (Bukti T-12), karena Penggugat tidak menjalankan tugasnya selama 2(dua) bulan terus menerus;- -----

Menimbang, bahwa selama 2(dua) bulan, Penggugat tidak melaksanakan tugas sejak tanggal 29 September 2005, selama kurun waktu 2(dua) bulan tidak melaksanakan tugas, Penggugat diberikan teguran- teguran tertulis oleh Tergugat untuk menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawabnya ( Bukti P - 12, P - 13, dan P - 14 ), hal tersebut dibenarkan pula oleh kesaksian saksi AHMAD NUR WAHYUDI,SH. namun dari ketiga teguran tertulis yang ditujukan kepada Penggugat, tidak ada satu pun yang mendapatkan tanggapan, sehingga dalam hal ini saksi AHMAD NUR WAHYUDI,SH selaku Staf Ahli Bupati Bidang Hukum setelah selang 1 (satu) bulan setelah panggilan III membuat surat pelimpahan kepada Bupati mengenai kasus Penggugat (Bukti T - 11);- -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sudah selayaknya Penggugat diberhentikan gajinya, karena ketentuan normatif telah mengaturnya, yaitu pemberhentian gaji Pegawai Negeri Sipil mulai bulan ketiga sejak 2(dua) bulan berturut- turut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan meninggalkan tugas secara tidak sah;- -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat masuk kerja kembali pada tanggal 26 Desember 2005, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, karena dari alat bukti surat berupa Daftar Hadir Absen tanggal 26 Desember 2005 (Bukti T - 7) tanda tangan Penggugat tidak tercantum dalam daftar hadir, melainkan pada tanggal 26 Desember 2005 Penggugat hadir dalam rangka diperiksa berkenaan dengan kasusnya setelah dijemput oleh orang tua Penggugat, hal tersebut sesuai dengan kesaksian saksi DARMANTO,SH selaku auditor di inspektorat yang memeriksa Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh BAWASDA yang dibuktikan dengan Berita Acara BAWASDA Kabupaten Demak, Tanggal 30 Desember 2005 (Bukti T - 14), ditemukan penyimpangan uang yang dilakukan oleh Penggugat yang diduga adanya penggunaan untuk kepentingan pribadi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal tersebut dibenarkan oleh Penggugat sendiri yang dapat dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Penggugat untuk mengembalikan uang anggaran DPRD sebesar Rp. 285.062.204,- paling lambat 2(dua) bulan setelah surat pernyataan dibuat pada tanggal 26 Desember 2005 (Bukti T - 13);- -----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan pertama oleh BAWASDA tanggal 26 Desember 2005 Penggugat tidak pernah hadir di kantor dan tidak melaporkan ketidakhadirannya kepada atasan yang berwenang hingga 6 (enam) bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang??..?.

berturut- turut, Penggugat tidak juga hadir untuk menyelesaikan kewajiban- kewajibannya termasuk pertanggungjawaban terhadap dana anggaran DPRD yang digunakan Penggugat selaku Pemegang Kas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Demak yang merangkap sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, BAWASDA menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan BAWASDA Demak Nomor : 356/06/K/2006/RHS, tanggal 6 Maret 2006 (Bukti T - 16), sebagai hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap Penggugat, namun sampai saat itu pula Penggugat tidak pernah hadir untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;-

Menimbang, bahwa dalam perjalanannya Penggugat juga tidak beritikad baik untuk hadir dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hingga dikeluarkannya teguran tertulis kembali kepada Penggugat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Demak sebanyak 3(tiga) kali, peringatan pertama tanggal 26 September 2006, peringatan kedua tanggal 22 Desember 2006 dan peringatnan ketiga tanggal 27 Februari 2007 untuk hadir dan bertanggungjawab (Bukti T - 20, T - 22, dan T - 24);-

Menimbang, bahwa meskipun kembali mendapatkan teguran namun Penggugat, tetap tidak hadir untuk bertanggungjawab serta mengembalikan uang anggaran DPRD yang digunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk kepentingan pribadi bahkan cenderung akan melarikan diri dengan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;- -----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil didasarkan kepada ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yakni;- -----

2) *Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat*

*(1) yang dalam waktu kurang dari 6(enam) bulan melaporkan diri kepada pimpinan instansinya dapat:- - -*

*a. Ditugaskan kembali apabila ketidakhadirannya itu karena ada alasan- alasan yang dapat diterima; atau;- -----*

*b. Diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila ketidakhadirannya itu adalah karena kelalaian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan menurut pendapat pejabat yang berwenang akan mengganggu suasana kerja, jika ia ditugaskan kembali;- -----*

Berdasarkan ketentuan diatas, untuk Pegawai Negeri Sipil, yang tidak melaporkan diri selama 6(enam) bulan berturut-turut haruslah melapor kepada atasan yang berwenang, dan disertai dengan alasan- alasan logis yang mampu untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pertimbangan dan dapat diterima;- ----- Nomor - ?? : ?? : ?- -----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dibutuhkan alasan yang dapat diterima, namun apa yang dilakukan oleh Penggugat dalam hal ini, dapat dinilai tidak mempunyai itikad baik, dikarenakan tidak pernah sekalipun Penggugat muncul untuk datang menghadap kepada pimpinan Penggugat dan melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai cukup beralasan bagi Tergugat untuk memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan bahwa:- -----

3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam waktu 6(enam) bulan terus menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah objek sengketa a quo berlaku surut sebagaimana didalilkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa objek sengketa tertanggal 5 Maret 2009 sedangkan pemberhentian Peggugat tidak dengan hormat terhitung mulai 1 Januari 2006 atau sejak Peggugat diberhentikan gajinya;- -----

Menimbang, bahwa saat surat keputusan yang menjadi objek sengketa diterbitkan, Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil masih berlaku dan belum dirubah dengan peraturan perundangan lainnya, sehingga pemberhentian Peggugat terhitung sejak 1 Januari 2006 tidak dapat dikatakan berlaku surut, selain untuk menghindari adanya tuntutan pembayaran gaji oleh Peggugat dimana gaji Peggugat sudah diberhentikan sejak tanggal 1 Januari 2006 sesuai dengan ketentuan normatif pemberhentian Peggugat diberhentikan dengan tidak hormat sejak dihentikan gajinya tanggal 1 Januari 2006

(Vide Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979);- -----

Menimbang, bahwa persoalan mengapa Surat Keputusan baru diterbitkan pada tanggal 5 Maret 2009, Tergugat menyatakan belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan dikarenakan Tergugat masih memberikan kesempatan bagi Peggugat untuk mengembalikan uang negara sekaligus merubah perilakunya, akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Peggugat, hal tersebut sesuai dengan kesaksian saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG t ersebut, ??..?.

HIDAYANTO;-----

-----

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada standar operasional prosedur terhadap jangka waktu keluarnya surat keputusan, maka dapat diartikan terhadap rentang waktu tersebut, Tergugat memberikan kebijaksanaan kepada Penggugat dan diharapkan kepadanya untuk mengembalikan uang negara dan memperbaiki perilakunya;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan a quo, telah terbukti bahwa penerbitan Surat Keputusan Objekum Litis baik ditinjau dari segi prosedur formal maupun dari segi substansinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan maupun Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya, sehingga dalil Penggugat yang tidak berdasarkan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;- -----

-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka terhadap permohonan Penggugat untuk dikembalikan harkat dan martabatnya serta pengembalian gaji Penggugat haruslah pula dinyatakan ditolak, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;- -----

-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM?..?.

Pasal 110 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;- -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti surat maupun keterangan saksi yang telah diajukan oleh para pihak dipersidangan yang tidak relevan dengan sengketa ini dikesampingkan, namun tetap dalam kesatuan berkas perkara ini;- -----

Memperhatikan Pasal- Pasal dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang- Undang 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

## M E N G A D I L

I- ----- **DALAM**

### EKSEPSI- -----

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;- -----

**DALAM** ----- **POKOK**

**PERKARA** -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-

--

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);-

-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari SENIN tanggal 17 Januari 2011

oleh kami : **MOCH. ARIEF PRATOMO,SH** sebagai Hakim Ketua Sidang,

**OENOEEN PRATIWI,SH.MH.** dan **TRI CAHYA INDRA PERMANA, SH.MH**

masing- masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 20 Januari 2011 oleh Majelis Hakim

tersebut, dibantu oleh **HARDINI SULISTYOWATI,,SH** sebagai

Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum

Tergugat;-

-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA SIDANG,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian ??..?.

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. OENOEEN PRATIWI,SH.MH.

MOCH. ARIEF PRATOMO,SH.

2. T.C.INDRA PERMANA,SH. MH.

P

ANITERA PENGGANTI,

HA

**Perincian biaya :**

1	Pendaftaran Gugatan .....	Rp.
.		30.000,-
2	Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp.
.	.....	109.000,-
3	Meterai Putusan .....	Rp.
.		6.000,-
4	Redaksi Putusan .....	Rp.
.		<u>5.000,-</u>
		Rp.
	<b>J u m l a h</b>	<u>150.000,-</u>
	( Seratus lima puluh ribu rupiah )	